

Konsep *Sustainability Report* bagi Pendidikan Tinggi di Indonesia (*Sustainability Report Framework for Higher Education in Indonesia*)

Siti Musyarofah

Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang PO. BOX 2 Kamal, Bangkalan Madura
Email : s_rofah@yahoo.com

Naskah masuk : 18 Januari 2011; Naskah diterima : 30 Mei 2011

ABSTRAK

Isu *sustainability reporting* di bidang pendidikan berkembang sejak adanya *The World Summit on Sustainable Development (WSSD)* yang diadakan di Johannesburg tahun 2002. Hal ini memberi dampak pada sistem pendidikan di seluruh dunia. Pendidikan dianggap berperan penting dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *Sustainability reporting* merupakan upaya dari suatu organisasi dalam memproduksi dan mempublikasikan *sustainability report* (laporan sustainabilitas). Laporan sustainabilitas merupakan laporan publik dimana organisasi memberikan gambaran posisi dan aktivitasnya pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial kepada stakeholder internal dan eksternalnya. Model-model pelaporan sustainabilitas yang ada selama ini seperti GRI (*Global Reporting Initiatives*) tidak bisa sepenuhnya diadopsi untuk kepentingan *sustainability reporting* bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan sebuah konsep *sustainability reporting* yang berusaha mengintegrasikan antara model-model yang telah ada dengan standar yang dikeluarkan oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi). Tulisan ini mencoba menawarkan sebuah konsep laporan sustainabilitas bagi Perguruan Tinggi dengan memodifikasi standar kinerja dari BAN-PT.

Kata kunci : Sustainability report, standar akreditasi, global reporting initiatives.

ABSTRACT

The issues of sustainability reporting (SR) in education have been developed since agenda of The World Summit on Sustainable Development (WSSD) in Johannesburg 2002th that give impact on education systems around the world. Education is very important to produce sustainable development. Sustainability reporting is an effort of organization to produce and publish sustainability report. Sustainability report is part of public report which organization give a picture of position and their activity on economic, environment, and social aspects to internal and external stakeholder. The sustainability reporting models such as Global Reporting Initiatives (GRI) can't fully adopted to higher education in Indonesia. It's required a concept for sustainability reporting that integrate previous models with standards of BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi). This study try to examine previous models of SR and supply a concept of sustainability reporting that has feasibility for higher education in Indonesia.

Keywords : Sustainability report, standar accreditation standart, global reporting initiatives.

PENDAHULUAN

Berbagai pihak mulai ramai membicarakan tentang *sustainability reporting* terkait dengan pembangunan berkelanjutan dalam konteks makro ekonomi. Perbincangan dan perdebatan mengenai pembangunan berkelanjutan diawali oleh terbitnya *Brundtland Report* pada tahun 1980, dan semakin diintensifkan dengan Konferensi PBB mengenai "Lingkungan Hidup dan Pembangunan" di Rio de Janeiro tahun 1992. Konferensi ini melahirkan

Agenda 21 yang ditandatangani oleh 178 kepala negara sebagai langkah konkret bagi implementasi pembangunan berkelanjutan pada skala global. PBB pada tahun 2002 kembali menyelenggarakan konferensi di Johannesburg dengan tema "*The 2002 World Summit for Sustainable Development*" untuk mengevaluasi perkembangan penerapan visi pembangunan berkelanjutan di dunia. Konsep *sustainability development* yang pertama kali dikenalkan dalam *Brundtland Report* sebenarnya untuk menunjukkan kemampuan suatu ekosistem

dalam mempertahankan proses ekologis, fungsi, *biodiversity* dan produktifitas dimasa mendatang. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk menyelaraskan antara pemenuhan kebutuhan manusia tanpa menciptakan kerusakan lingkungan. Namun belakangan ini istilah *sustainability* dipersepsikan secara beragam dari berbagai disiplin ilmu, tidak terkecuali akuntansi karena akuntansi sangat berkepentingan dengan bentuk/model pelaporan kinerja sebagaimana halnya *sustainability reporting*.

Isu *sustainability reporting* di bidang pendidikan berkembang sejak adanya *The World Summit on Sustainable Development* (WSSD) yang diadakan di Johannesburg tahun 2002. Hal ini memberi dampak pada sistem pendidikan di seluruh dunia. Pendidikan dianggap berperan penting dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). PBB untuk *general affair* menanggapi ini dengan mendeklarasikan the *Decade of Education for Sustainable Development* untuk periode 2005-2014 dan menunjuk UNESCO sebagai organisasi yang akan mengawal rencana besar ini. UNESCO diminta untuk : 1) mengembangkan draft skema implementasi internasional dalam proses pendidikan yang telah ada termasuk "*education for all*" 2) mengembangkan skema konsultasi dengan PBB, organisasi internasional, pemerintah, NGO, dan stakeholder yang lain. 3) menyiapkan pedoman bagi pemerintah untuk menyusun pengukuran-pengukuran ESD (*education for sustainable development*) dalam rencana pendidikan nasional mereka. Dengan demikian isu ini tidak terlepas dari masalah evaluasi dan pelaporan *sustainable development* tetapi juga *outcome* yang diharapkan.

Mengingat UNESCO dalam agenda pendidikan internasional abad 21 telah telah mencanangkan perubahan dari pendidikan berbasis lingkungan (*environmental education*) menuju pendidikan berbasis sustainabilitas (*sustainability education*). Dengan demikian mau tidak mau sistem pendidikan diseluruh dunia nantinya akan mengadopsi sistem pendidikan ini. Secara tidak langsung hal ini akan terkandung dalam muatan kurikulum pendidikan tinggi, yang pada akhirnya diprediksikan akan merambah ke bentuk pelaporan *sustainability* di pendidikan tinggi mengingat karakteristik unik yang dimiliki pendidikan tinggi dengan sektor jasa lainnya. Profesi akuntansi yang lahir dari dunia akademik harus turut mengembangkan akuntansi berbasis lingkungan (Dillard *et al.* 2005). Isu *sustainability reporting* bagi sektor privat tampaknya begitu cepat direspon oleh pemerintah melalui penerbitan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, meskipun dalam praktik masih banyak pertentangan karena adanya keberatan dari berbagai kalangan khususnya pelaku bisnis, karena

mereka menganggap aktivitas terkait dengan *sustainability development* akan menjadi biaya tersendiri bagi perusahaan. UU ini mengatur bahwa usaha yang bergerak dalam pengelolaan sumberdaya alam wajib menganggarkan dan melaporkan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Demikian juga, UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa penanaman modal didasarkan pada *asas berkelanjutan* dan *asas berwawasan lingkungan*. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian pemerintah terhadap *sustainable development* yang direalisasikan melalui regulasi. Sebaliknya yang terjadi pada bidang pendidikan di Indonesia, isu tentang *sustainability reporting* masih sangat terbatas, meskipun istilah *sustainability development* (SD) sudah seringkali kita dengar dalam konteks pembangunan berkelanjutan termasuk didalamnya dunia pendidikan. Sebagai langkah awal di tahun 2010, pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Tinggi DP2M menyelenggarakan hibah penelitian bagi dosen dengan tema pengembangan pendidikan berbasis *education for sustainable development* (ESD). Hal ini diharapkan memberikan dampak yang luas bagi sistem pendidikan berbasis *sustainable development* yang lebih bersifat praktis tidak hanya dalam tataran teoritis.

TELAAH KRITIS TERHADAP MODEL SUSTAINABILITY REPORTING

Pembahasan tentang *sustainability reporting* (SR) tidak terlepas dari isu *Sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) sebagaimana tertuang dalam *Our Common Future* atau Brundtland Report (WCED, 1987:43) yang menyebutkan bahwa : "*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*". Pada prinsipnya pembangunan yang dilaksanakan tidak boleh mengganggu hak generasi mendatang untuk memperoleh kesempatan hidup yang layak. Oleh karena itu ada tiga dimensi utama yang terkandung didalamnya yaitu lingkungan hidup, sosial dan ekonomi.

Sustainability reporting merupakan upaya dari suatu organisasi dalam memproduksi dan mempublikasikan *sustainability report* (SR). SR – menurut *World Business Council for Sustainable Development* – bisa didefinisikan sebagai laporan publik dimana organisasi memberikan gambaran posisi dan aktivitas perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial kepada stakeholder internal dan eksternalnya (WBCSD 2002:7). Dengan demikian, SR, idealnya, mengintegrasikan tiga bentuk laporan sebelumnya (keuangan, sosial dan lingkungan). *Sustainability Reporting* menurut ACCA seperti dikutip oleh Anggraini (2006) adalah

pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *Sustainability report* harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang *Sustainability Development* yang membawanya menuju kepada *core business* dan sektor yang ditekuni. Sementara GRI Guidelines (2002) menyebutkan bahwa "*sustainability reporting*" in terms of economic, environmental, and social performance (also known as the "triple bottom line"). This structure has been chosen because it reflects what is currently the most widely accepted approach to defining sustainability.

Kualitas mengenai *sustainability reporting* bisa dilihat dari kelengkapan, komunikasi, konvergensi, kredibilitas, materialitas, *responsiveness*, *performance/impact focus* dan *assurance*. Untuk *assurance*, maka ada suatu lembaga misalnya *Institute of Social and Ethical Accountability* yang akan memberikan jaminan atas kualitas laporan *sustainability* suatu organisasi. Untuk itu mereka menerbitkan sebuah *Assurance Standard AA1000* Tahun 2003 yang bisa diikuti oleh organisasi yang menyelenggarakan *sustainability reporting*. Adapun model *sustainability reporting* yang akan dibahas pada bagian ini yaitu GRI (*Global Reporting Initiatives*).

Global Reporting Initiatives (GRI)

GRI (*Global Reporting Initiatives*) merupakan model *sustainability report* yang pertama kali diluncurkan tahun 1997, merupakan inisiatif bersama dari US, Ceres dan PBB bidang lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat dari *sustainability report*. Panduan ini bersifat sukarela yang membantu melaporkan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial suatu organisasi (dikenal dengan *triple bottom line*). GRI berusaha melakukan harmonisasi atas *disclosure*. Bisa dikatakan bahwa GRI merupakan *initiatives* yang pertama kali, yang berusaha mengukur *sustainability* suatu organisasi. GRI *guidelines* merupakan kerangka untuk pelaporan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial suatu organisasi. *Guidelines* itu : 1) menyajikan prinsip pelaporan dan kandungan tertentu bagi penyajian laporan berkelanjutan (*sustainability report*) 2) membantu organisasi menyajikan gambaran yang seimbang dan beralasan atas kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial. 3) meningkatkan daya banding laporan berkelanjutan diantara organisasi yang tersebar secara geografis, dan 4) mendukung *benchmark* dan penilaian *sustainability report* yang mengarah pada kode, prinsip, standar kinerja dan pengungkapan sukarela. 5) merupakan instrumen untuk memfasilitasi kepentingan

stakeholder. Secara umum GRI mengandung dua prinsip, yaitu:

1. Prinsip untuk menentukan indikator seperti apa yang seharusnya dilaporkan, yang terdiri dari :
 - *Materiality*, dimaksudkan bahwa informasi yang dilaporkan merupakan indikator yang mencerminkan dampak organisasi secara signifikan di bidang ekonomi, lingkungan dan sosial yang akan mempengaruhi penilaian dan keputusan stakeholder.
 - *Stakeholder inclusiveness*, artinya organisasi pelapor seharusnya mengidentifikasi stakeholdernya, menjelaskan bagaimana mereka diakomodasi kepentingannya.
 - *Sustainability context*, laporan seharusnya menyajikan kinerja organisasi dalam konteks *sustainability* yang lebih luas.
 - *Completeness*, meliputi topik dan indikator yang material yang bisa mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial dan memungkinkan stakeholder menilai kinerja organisasi dalam periode pelaporan.
2. Prinsip untuk menjamin kualitas penyajian informasi, yang terdiri dari :
 - *Balance*, artinya laporan harus menggambarkan aspek positif dan negatif dari kinerja organisasi.
 - *Clarity*, informasi yang disajikan seharusnya mudah dipahami dan mudah diakses oleh stakeholder.
 - *Accuracy*, artinya informasi yang dilaporkan seharusnya cukup akurat dan rinci bagi stakeholder untuk menilai kinerja organisasi.
 - *Timeliness*, pelaporan dilakukan secara reguler dan informasi bisa tersedia pada saat stakeholder hendak mengambil keputusan.
 - *Comparability*, menunjukkan bahwa isu dan informasi seharusnya diseleksi, dikompilasi dan dilaporkan secara konsisten yang memungkinkan stakeholder menilai perubahan kinerja organisasi sepanjang waktu dan menganalisisnya dengan membandingkan antar organisasi.
 - *Reliability*, artinya informasi dan proses yang digunakan dalam menyajikan laporan seharusnya dikumpulkan, dicatat, dikompilasi, dianalisis dan diungkapkan dapat menjamin kualitas dan materialitas informasi.

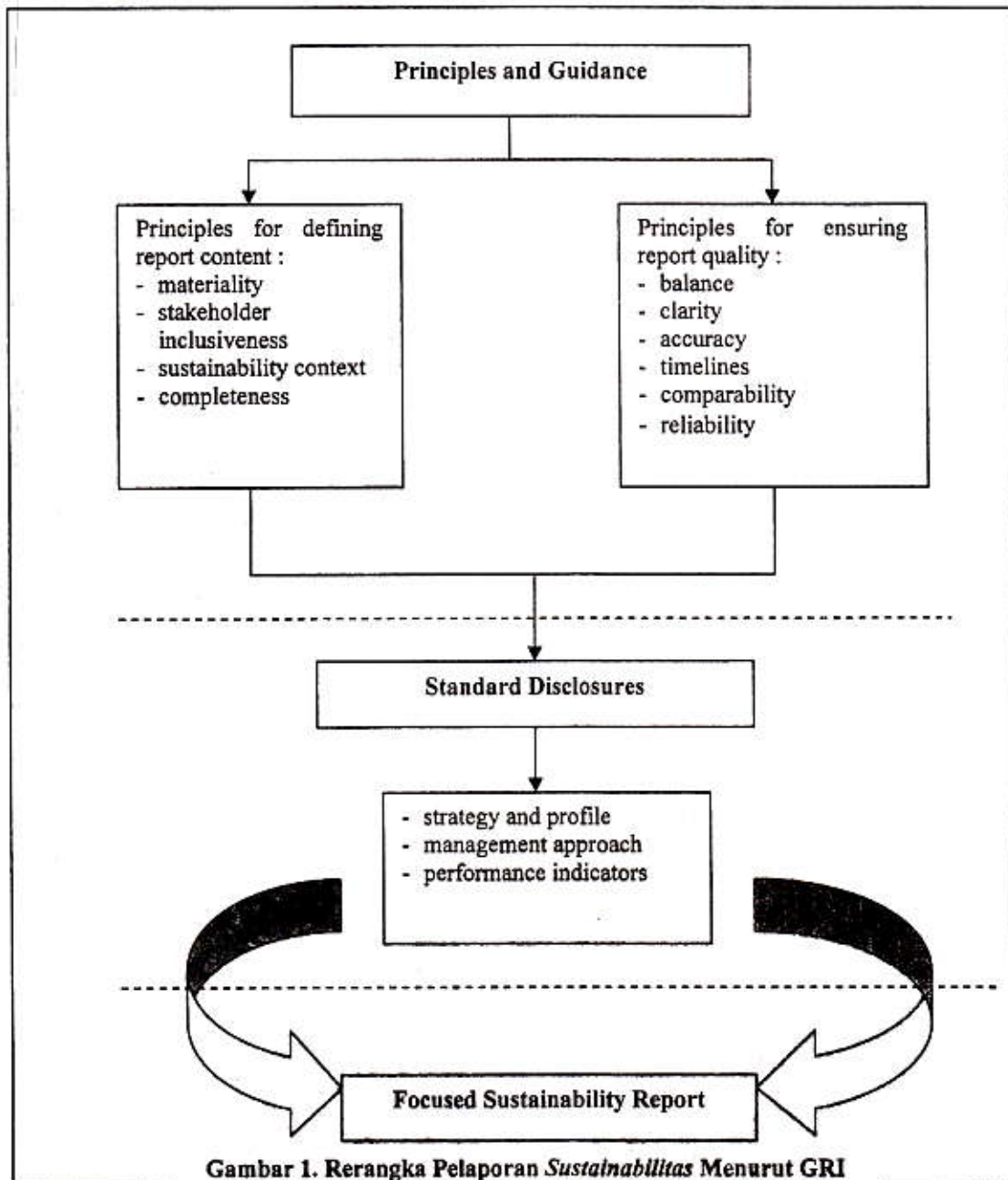
Jika kita cermati, maka akan tampak bahwa beberapa prinsip diatas yaitu *materialitas*, *kelengkapan*, *ketepatan waktu*, *daya banding* dan *reliabilitas/keandalan* dibangun mirip dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam akuntansi tradisional (Moneva et al. 2006 p. 128). Dia menggambarkan bahwa karakteristik kualitatif dalam pelaporan *sustainability* ditentukan oleh

tujuan/objectives dan interaksi antara tujuan dengan kepentingan stakeholder.

Prinsip *completeness* (kelengkapan) akan berhadapan dengan *information overload*, karenanya akan sangat sulit mengidentifikasi isu-isu kunci yang seharusnya menjadi fokus perhatian organisasi. Sedangkan prinsip *stakeholder inclusiveness* menempati *high quality sustainability report*, sementara dalam praktik hal ini sangat sulit dilakukan karena masing-masing punya pendekatan yang berbeda dalam melakukan dialog dengan stakeholdernya, termasuk bagaimana mengidentifikasi stakeholder mereka.

1) *CEO statement*, 2) *Organization profile*, 3) *Scope*, 4) *Key impact*, 5) *Governance*, 6) *Sustainability related policies statement*, 7) *Management system and procedures*, 8) *Stakeholder engagement*, 9) *Performance and compliance*, 10) *Target and achievement*, dan 11) *External assurance*. GRI memberikan kesempatan bagi setiap organisasi untuk memberikan penilaian sendiri kinerja mereka dengan menentukan level minimum yang seharusnya dilaporkan yang mengacu pada *application level* dengan skor A, B dan C. Berikut ini digambarkan secara utuh rerangka pelaporan sustainabilitas menurut GRI :

Beberapa prinsip pelaporan menurut GRI nantinya akan menjadi input bagi *standard disclosure*. Komponen pengungkapan standar (*standard disclosure*) menurut GRI seharusnya terdiri dari :



Gambar 1. Rerangka Pelaporan *Sustainabilitas* Menurut GRI

Performance Indicators (Indikator Kinerja) menurut GRI

Unsur-unsur yang bisa dimasukkan dalam penentuan indikator kinerja ada sekitar 79 item, yang terdiri dari indikator kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial. Indikator ekonomi yang diusulkan didasarkan pada skema *value added statement* yang fokus pada pola dimana organisasi mempengaruhi stakeholdernya melalui interaksi ekonomis secara langsung maupun tidak langsung. Kinerja ekonomi menunjukkan dampak arus kapital diantara beragam stakeholder dan dampak utama organisasi bagi seluruh masyarakat. (GRI, 2002-2006. p.25). Kinerja lingkungan banyak dipengaruhi oleh sistem manajemen lingkungan yang mengacu pada ISO 14000. Skema GRI didasarkan pada efisiensi konsumsi (material, energi dan air) yang mempengaruhi biodiversity, dan berdampak pada minimisasi (*emissions, wastes and effluents, products and services*). Kinerja sosial termasuk didalamnya praktik ketenagakerjaan dan pekerjaan yang pantas (*labour practices and decent work*), hak asasi manusia (*human right*), kemasyarakatan (*society*), dan tanggungjawab terhadap produk (*product responsibility*). Berikut ini disajikan indikator kinerja menurut GRI (tabel 1).

Tabel 1. Indikator Kinerja Menurut GRI

	Category	Aspect
Economic	Flow of capital Main economic impact	Economic performance Market presence Indirect economic impact
Environmental	Environmental	Materials Energy Water Biodiversity Emissions, effluents, and waste Products and services Compliance Transport Overall
Social	Labour Practices & Decent Work	Employment Labour/management relations Occupational Health and safety Training and education Diversity and equal opportunity
	Human Rights	Investment and procurement practice Non-discrimination Freedom of association & collective bargaining Abolition of Child labour Prevention of Forced and compulsory labour Complaints and Grievance Practices Security practices Indigenous rights

Category	Aspect
Society	Community Corruption Public Policy Anti competitive behaviour Compliance
Product Responsibility	Customer health and safety Products and services labeling Marketing communications Customer privacy Compliance

Sumber : GRI 2002-2006 Versi 3.0

Dari masing-masing indikator kinerja ditentukan adanya indikator inti (*core indicators*) dan indikator tambahan (*additional indicators*). Indikator inti dianggap menjadi kepentingan utama dari stakeholder, sedangkan indikator tambahan akan digunakan berdasarkan kepentingan organisasi pelapor jika dianggap perlu.

Penilaian terhadap indikator kinerja inti dan tambahan, menunjukkan adanya ketidakseimbangan, karena dimensi sosial secara keseluruhan sangat dominan. Kelemahan nyata dari GRI adalah GRI tidak memberikan panduan bagaimana organisasi memilih indikator kerjanya (Boysen, 2009. p.11). Selain itu tidak adanya indikator yang terintegrasi (*integrated indicators*) akan mengurangi makna *sustainability* itu sendiri jika dilihat dari pendekatan holistik dan *balance* yang diusulkan dalam GRI. (Bebbington, 2001; Moneva, 2006).

GRI memberikan dokumen panduan untuk menilai kinerja sustainabilitas suatu organisasi. Namun selalu ada celah kelemahan yang bisa diidentifikasi dalam GRI seperti yang dikritisi oleh Odd (2003) bahwa :

1. Definisi dan metrik yang tersedia dianggap tidak cukup,
2. Kurangnya penjelasan yang disertai contoh secara detail,
3. Kurangnya komparabilitas antar industri/organisasi,
4. Jumlah yang berlebihan dalam indikator kinerja yang dipertimbangkan sulit bagi pelapor SR (*sustainability report*) baru,
5. Pendekatan yang bersifat "satu untuk semua (*one for all*)" dianggap tidak mengakomodasi kebutuhan sektor yang berbeda, kompleksitas, dan lingkungan regional yang berbeda,
6. Indikator kinerja ekonomi dan sosial tidak dikembangkan sebagaimana indikator lingkungan, dan
7. Saat ini masih terbatas organisasi yang menerapkan GRI dan jaminan masa depan tidak ada.

Berangkat dari kelemahan diatas, seharusnya ada suatu upaya untuk memperbaiki pengukuran kinerja sustainabilitas, dalam hal ini peran perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan konsep sustainabilitas sangat diharapkan.

KONSEP SUSTAINABILITY REPORTING BAGI PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

Mengingat kompleksitas dan beberapa kelemahan model pelaporan sustainabilitas yang disajikan dalam GRI sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka perlu kiranya dipikirkan kembali jika kita akan mengadopsi model pelaporan sustainabilitas yang sudah ada tersebut. Pendidikan tinggi di Indonesia sebenarnya memiliki karakteristik unik tidak hanya jika dibandingkan dengan pendidikan tinggi di luar negeri, tetapi juga antar pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh ragam latar belakang kultural. Oleh karena itu aspek kultural seharusnya ditonjolkan dalam desain pelaporan sustainabilitas.

Pendidikan tinggi menurut UU No. 20 Tahun 2003 merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah, yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Bidang pendidikan tinggi merupakan pilar utama untuk mengembangkan teknologi dan keahlian manajerial di Indonesia agar bangsa Indonesia mampu memimpin kegiatan politik, ekonomi dan sosial baik untuk masa kini maupun di masa yang akan datang. Tujuan utama pendidikan tinggi di Indonesia menurut PP No. 60 tahun 1999 yaitu : 1) menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; 2) mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Mengacu pada Tridharma Perguruan Tinggi, maka PT wajib menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta, pengabdian masyarakat.

Untuk menjamin kualitas pendidikan di Indonesia maka pemerintah menerbitkan PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mencakup: 1) standar isi, 2) standar proses, 3) standar kompetensi lulusan, 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan pendidikan dan 8) standar penilaian pendidikan. Sedangkan untuk menjamin evaluasi terhadap kualitas pendidikan tinggi, maka

pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang tugasnya melakukan akreditasi terhadap kelayakan program studi di lingkungan PT yang mengacu pada pedoman standar berikut :

- Standar 1 : Visi, misi tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian
- Standar 2 : Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu
- Standar 3 : Mahasiswa dan lulusan
- Standar 4 : Sumberdaya manusia
- Standar 5 : Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik
- Standar 6 : Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- Standar 7 : Penelitian, pelayanan/pengabdian pada masyarakat dan kerjasama.

Jika dicermati standar tersebut diatas bisa mewakili kondisi sustainabilitas organisasi dari dimensi ekonomi dan sosial, sementara untuk dimensi lingkungan belum terlihat.

Desain pelaporan sustainabilitas bagi perguruan tinggi di Indonesia seharusnya mengakomodasi kepentingan stakeholder, tidak hanya terbatas pada akomodasi terhadap kepentingan pemerintah seperti yang umum terjadi saat ini, tetapi stakeholder potensial yang lebih luas. Oleh karena itu hal yang perlu dilakukan oleh Perguruan tinggi (PT) diantaranya :

- 1) Menentukan fungsi/peran *sustainability report* (SR) itu sendiri.
- 2) Melakukan identifikasi stakeholder potensial (baik dari internal maupun eksternal PT)
- 3) Jenis informasi apa yang dibutuhkan oleh stakeholder, serta
- 4) Karakteristik kualitatif yang mendasari SR.

Peran *sustainability reporting* (SR) bagi pendidikan tinggi tidak hanya untuk menjamin kelangsungan hidup PT itu sendiri sebagai organisasi (entitas), tetapi juga menjamin bahwa PT berkontribusi terhadap masyarakat disekitar PT dan masyarakat secara umum, selain itu PT diharapkan juga mampu memberikan kontribusi terhadap lingkungan hidup (*environment*). Oleh karena itu bentuk laporan yang disajikan oleh PT seharusnya tidak hanya bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif.

Identifikasi terhadap stakeholder menurut Clarkson (1995) dibedakan kedalam: 1) *primary stakeholder*, dan 2) *secondary stakeholder*. *Primary stakeholder* merupakan individu atau kelompok yang sangat tergantung pada keberhasilan dan kelangsungan hidup organisasi tersebut. Sedangkan *secondary stakeholder* merupakan individu atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kelangsungan hidup organisasi namun tidak esensial atau tidak secara langsung. Coy et al (2001)

mengidentifikasi stakeholder potensial diantaranya: 1) internal kampus, 2) pesaing, 3) perwakilan yang ditunjuk, 4) penyedia sumberdaya, 5) *external citizens*, dan 6) analis dan media.

Setelah mengetahui stakeholder PT maka, selanjutnya adalah menggali informasi apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh mereka. Namun perlu diperhatikan bahwa untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi seluruh stakeholder maka akan muncul konflik kepentingan (Pina *et al.* 2007). Oleh karena itu PT harus bisa menentukan prioritas informasi yang seharusnya disajikan.

Untuk menjamin kualitas informasi yang disajikan maka harus dipayungi dengan karakteristik kualitatif sebuah laporan. Karakteristik kualitatif laporan tahunan untuk memenuhi akuntabilitas publik menurut Coy *et al.* (2001) meliputi : *understandability, reliability, relevance, timeliness, consistency, comparability, fairness, accessibility dan distribution.*

Berikut disajikan desain laporan sustainabilitas bagi pendidikan tinggi yang berusaha memodifikasi standar kinerja yang telah ada dari BAN-PT dengan penambahan pada dimensi lingkungan hidup (LH) yang selama ini belum ada.

Tabel 2. Konsep Sustainability Report Bagi Perguruan Tinggi

No	Standar	Indikator
1	Visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> - visi yang futuristik, menantang dan memotivasi seluruh pemangku kepentingan - misi yang sesuai dengan tridarma perguruan tinggi - tujuan dan sasaran yang realistis, unik dan terfokus - strategi pencapaian secara tertulis
2	Tata pamong	<ul style="list-style-type: none"> - Tata pamong yang memenuhi unsur Kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan fairness - Penjaminan mutu internal - Penjaminan mutu eksternal
3	Mahasiswa dan Lulusan	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan dan efektivitas implemtasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa - Profil mahasiswa - Layanan dan kegiatan kemahasiswaan - Profil lulusan - Tracerstudy terhadap lulusan - Partisipasi lulusan dan alumni
4	Sumberdaya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi akademik dosen - Prestasi, reputasi dan jejaring akademik dosen - Kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga

No	Standar	Indikator
		<ul style="list-style-type: none"> kependidikan. - Keefektivan sistem seleksi, rekrutme, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan - Sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan
5	Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik	<ul style="list-style-type: none"> - Keselarasan kurikulum dengan visi dan misi, serta relevansinya dengan pencapaian kompetensi lulusan - Peninjauan kurikulum - Stratgi pembelajaran - Upaya perbaikan sistem pembelajaran - Upaya peningkatan suasana akademik
6	Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan tentang proses penganggaran dan perencanaan target kinerja - Ruang kerja dosen - Akses dan pendayagunaan sarana dan prasarana - Akses dan pendayagunaan sistem informasi
7	Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat - Partisipasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat dan kerjasama - Produktifitas penelitian dosen dan atau mahasiswa (publikasi penelitian) - Kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan - Jumlah dan mutu kerjasama
8	Kontribusi Pendidikan Tinggi terhadap Lingkungan Hidup (LH)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kebijakan yang dihasilkan terkait dengan isu lingkungan hidup - Komitmen terkait dengan LH (visi, misi dan strategi) - Kurikulum yang berorientasi pada pelestarian LH - Hasil penelitian yang bermanfaat bagi pelestarian LH - Pendirian departemen pelestarian LH - Jumlah staff dan dana yang dialokasikan untuk menunjang departemen LH

Jika dicermati dari tabel 2 diatas, sebenarnya ketujuh standar akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN-PT sudah berusaha memenuhi unsur sustainabilitas baik dilihat dari dimensi ekonomi, maupuan sosial. Misalnya standar 6 tentang pembiayaan sebenarnya detail informasi yang harus

disajikan menunjukkan kinerja PT dari aspek ekonomi, demikian juga standar 4 tentang sumberdaya manusia dan standar 7 tentang penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan perwujudan dari dimensi sosial dari Sustainability Report. Standar 8 tentang kontribusi PT terhadap lingkungan hidup sebenarnya untuk melengkapi standar yang telah ada yang belum memasukkan dimensi lingkungan (*environment*).

KESIMPULAN

Pendidikan Tinggi (PT) merupakan organisasi jasa yang memiliki karakteristik unik, yang tidak berorientasi pada maksimisasi laba (*profit oriented*). Namun untuk menjamin kelangsungan hidup suatu organisasi aspek keuangan (ekonomis) juga harus tetap diperhatikan selain aspek yang lain yang mencirikan tridarma perguruan tinggi.

REKOMENDASI

Konsep sustainability report (SR) bagi pendidikan tinggi di Indonesia bisa didesain berdasarkan karakteristik unik di masing-masing pendidikan tinggi tanpa meninggalkan beberapa kriteria standar kinerja yang telah ada sebelumnya. Artinya perlu adanya modifikasi model pelaporan sustainabilitas. Mengingat standar kinerja yang telah ada sebelumnya sudah berusaha menampilkan kinerja dari dimensi ekonomi dan sosial dengan beragam indikator kinerja yang ada, maka dimensi lingkungan yang belum terakomodasi seharusnya juga dimasukkan dalam pelaporan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Reni, 2006. Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta), Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
- BAN PT, 2008. Standard dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana, Buku II
- Bebbington, J., & Gray, R. 2001. An account of sustainability: failure, success and a reconceptualization. *Critical Perspectives on Accounting*, 12, 557-587.
- Boysen, Mark C, 2009. An Assesment of Environmental Indicator Data Quality in GRI Sustainability Reporting,. Theses, Proquest digital dissertation and theses
- Coy, David., Fischer, Mary., and Gordon, Teresa., 2001. Public Accountability : A New Paradigm For College and University Annual Report., *Critical Perspectives on Accounting*. 12., pp. 1-31.
- Dillard, Jesse., Brown, Darrell., and, Marshall, R Scot., 2005. Environmentally enlightened accounting., *Accounting Forum* 29. pp. 77-101
- Gray, Rob., 2010. Is accounting for sustainability actually accounting for sustainability. . and how would we know? An exploration of narratives of organisations and the planet., *Accounting, Organizations and Society*., Vol.35., pp. 47-62
- GRI, 2002. Sustainability Reporting Guidelines.
- Institute of Social and Ethical Accountability, 2003. Accountability AA1000 Standard
- Moneva, Jose M., Archel, Pablo., and Correa, Carmen., 2006. GRI and Camouflaging of corporate unsustainability., *Accounting Forum* 30, pp. 121-137
- Odd, Margareth N A., 2003. The Global Reporting Initiatives : To what extent do the GRI corporate sustainability guidelines enable business to move towards sustainability?, Dissertation, University of Calgary Canada
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999. Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Pina, Vicente., Torres, Lourdes., and Acerete, Basilio., 2007. Are ICTs promoting government accountability?: A comparative analysis of e-governance developments in 19 OECD countries., *Critical Perspectives on Accounting*. Vol 18. pp.583-602.
- World Business Council for Sustainable Development (WBSD), 2002. Sustainable Development Reporting-Striking a Balance., WBCSD Report, Attar Roro Presse, Switzerland.